

Nawacita Hukum

GENAP sudah satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjalankan amanat rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Banyak komentar dan pendapat tentang kinerja rentang satu tahun ini. Penilaian akhirnya, ada pada rakyat.

Dalam bidang hukum, apabila melihat misi pemerintah adalah menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sebuah misi yang sangat mulia. Akan tetapi, sulit untuk terwujud apabila hanya mengandalkan tekad.

Perlu kerja keras serta *political will* yang kuat dari pemerintah, serta dukungan dari semua elemen, termasuk para pelaksana di bidang hukum.

Sistem hukum

Membangun sistem hukum Indonesia harus ditegaskan dulu, apakah akan mengadopsi sistem hukum yang selama ini kita kenal, atau kita membangun sistem hukum yang mempunyai corak tersendiri yaitu sistem hukum Pancasila.

Ini perlu karena Pancasila lah dasar pijakan kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Sistem hukum kita harus dibangun atas dasar spirit dan ideologi Pancasila.

Sejarah hukum kita dengan sangat indah digambarkan oleh orang Belanda yang pertama kali datang ke Nusantara. Mereka mengatakan, di tanah nusantara ini sudah ada sistem masyarakat yang teratur dan dibangun sistem hukum yang apik.



Edi Setiadi

Rektor Unisba

Hanya karena penjahalan sistem hukum kita yang sudah ada sejak dulu menjadi terhapus (dihapuskan?) sehingga sistem hukum kita tampak sebagaimana yang kita lihat dan rasakan sampai saat ini. Sistem dan hukum kita sebagian besar berasal dari masa pemerintahan kolonial.

Menilik misi bidang hukum pemerintah yang kemudian diurai dalam beberapa program yaitu penataan regulasi, reformasi sistem dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengembangkan budaya sadar hukum dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, kalau ini terlaksana, akan tercipta suatu tatanan hukum yang menunjung jati diri bangsa.

Selain itu, akan tercipta bangunan kelembagaan dan sistem hukum yang baik, masyarakat tertib, dan pemerintahan yang bersih, bebas dari berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

Pemerintah bukan tidak berusaha mewujudkan misinya. Namun, dalam satu tahun ini, terlihat kegamangan dan disorientasi untuk mewujudkan misi tersebut, terutama di tahap implementasi atau tahap aplikasi. Seperti proyek besar penataan regulasi yang dikenal dengan

program *omnibus law*.

Alih-alih mendatangkan ketenangan, yang terjadi penolakan dari sebagian masyarakat kita dengan berbagai alasan. Sementara pemerintah bersikukuh, *omnibus law* akan membawa kemashlahatan bagi rakyat.

Dalam pembangunan sistem hukum, pembuatan perundang-undangan tahap formulasi (di parlemen) sangat penting karena pada tahap ini lah politik hukum ditentukan, ke arah mana hukum ditujukan, dan apa makna yang terkandung dalam sebuah perundang-undangan.

Dengan demikian, penataan regulasi pada tahap ini jangan dianggap biasa-biasa saja. Namun, mempunyai peranan penting bagi keberhasilan tujuan dari hukum itu sendiri. Di parlemen inilah semua produk perundang-undangan akan menentukan jalannya kehidupan bernegara kita dalam segala aspek.

Oleh karena itu, pengerjaan di parlemen yang mengabaikan prosedur, mekanisme, dan masukan dari masyarakat, hanya akan menghasilkan sebuah UU yang cacat dan tidak memenuhi harapan masyarakat.

Korupsi

Jalannya penegakan hukum juga menjadi sorotan. Penegakan hukum adalah

upaya pemerintah dalam menjalankan hukum untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, politik penegakan hukum harus diarahkan pada pemenuhan keadilan dari para pihak, pelaku dan korban serta masyarakat dan negara.

Penegakan hukum tidak boleh diskriminatif. Prinsip persamaan di depan hukum harus menjadi dasar pijakan untuk menjalankannya. Penegakan hukum harus menegakkan keseimbangan kepentingan supaya tidak ada para pihak yang merasa terzalimi. Jalannya penegakan hukum harus juga ada ujungnya, sesuai dengan asas *litis piniiri oportet*.

Problem terbesar dan belum berhasil ditekan adalah masih banyaknya kasus korupsi. Korupsi bukannya makin surut tetapi terus berkembang, baik modus maupun kerugian negara.

Lemba-lemba penegakan hukum yang ada belum berhasil melaksanakan tugasnya, malah legal aparaturnya terlibat, seperti kasus Jaksa PN dan Irjen NB Korupsi ibarat wabah corona yang cepat menular dan sulit disembuhkan.

Korupsi telah menyebabkan negara semakin kehilangan arah karena tugas utama negara adalah menyejahterakan rakyatnya.

Korupsi telah mengampunasi kemampuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya, sekaligus mengancam sendi-sendi perekonomian suatu negara. Oleh

bencana

WASPADA. La Nina bisa timbulkan bencana.

- *Optimalikan mitigasi bencana.*

pengungsi

ANTISIPASI pengungsi di tengah pandemi.

- *Awas, Covid-19 mengancam.*

tinjau

KSPI dorong DPR tinjau ulang UU Cipta Kerja.

- *Dengar aspirasi rakyat!*

Si Habajan

karena itu, selain kemampuan legal aparaturnya yang harus ditingkatkan, juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Betapa sulitnya meningkatkan budaya sadar hukum masyarakat dapat dilihat dari budaya berfalu lintas dan pemanfaatan ruang publik, atau berurusan dengan pejabat yang memiliki kewenangan yang bersinggungan dengan kepentingan publik.

Regulasi sudah dipangkas dengan rogram debirokratisasi. Namun, budaya masyarakat yang serbaistan, mendorong aparaturnya melakukan korupsi. Korupsi seolah-olah sudah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat kita.***